



Penyerahan gerobak sampah yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja kepada bank sampah, Senin (2/1). DLH Jogja mempersiapkan 30 gerobak sampah agar

dimanfaatkan masyarakat khususnya pengelola bank sampah. **Berita terkait ada di Halaman 1.**

1st/DLH Jogja

Lima TPST Dibangun di DIY

Anisatul Umah, Triyo Handoko,
& Andreas Yuda Pramono
redaksi@harianjogja.com

SLEMAN—Sejumlah daerah di DIY mulai membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk menanggulangi *overload* TPST Piyungan.

Pemkab Sleman membangun empat TPST sekaligus, Pemkab Bantul membangun satu.

Sebanyak empat TPST di Bumi Sembada ditargetkan rampung dibangun tahun ini. Setelah TPST dioperasikan, sampah dari Sleman tidak

akan lagi dibuang di TPST Piyungan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Dwi Anta Sudibya, mengatakan TPST akan dibangun di empat lokasi dan tiga di antaranya selesai tahun ini. Wilayah yang akan menjadi tempat pendirian TPST adalah Kalasan, Caturtunggal, Sendangrejo, dan Turi. Namun, rencana pembangunan TPST di Turi masih dalam tahap negosiasi.

Keempat TPST itu akan menampung sampah dari semua wilayah di Sleman sehingga tidak ada sampah dari Sleman yang dibuang ke Piyungan. Saat ini, TPST

Piyungan menampung sampah dari Kota Jogja, Sleman, dan Bantul. Kapasitas TPST Piyungan sudah penuh pada tahun ini. “Kami tahu jadwal Piyungan akan habis di 2023 sehingga kami mengejar waktu. Mudah-mudahan akhir tahun ini minimal tiga TPST sudah operasi,” ucapnya, Senin (2/1).

Demi menekan produksi sampah di Sleman, Bupati Sleman telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Gerakan Pilah Sampah dari Rumah. Namun, pemilahan sampah di rumah tangga masih sulit dijalankan sehingga pemerintah lebih fokus membangun TPST.

Lima TPST...

TPST yang berada di Kabupaten Sleman akan dikelola oleh swasta. Dwi Anta menjelaskan produksi sampah di Sleman sangat tinggi, per bulan mencapai 283 ton.

Kepala UPTD Persampahan Kabupaten Sleman, Rita Probowati, menyampaikan empat TPST yang tengah dibangun saat ini masih dalam tahap penyusunan *detail engineering design* (DED) dan izin Gubernur DIY. TPST yang kemungkinan segera dibangun berada di Kalasan.

Di Bantul, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera membangun TPST di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan.

Pembangunan yang dimulai pada 2023 tersebut menggunakan dua sistem pendanaan yaitu dari APBD dan Pemerintah Pusat. Kepala DLH Bantul, Ari Budi Nugroho, mengatakan pembangunan TPST memanfaatkan tanah kas desa. Proses pengajuan ke Gubernur DIY juga sudah dilakukan termasuk sosialisasi dengan warga dan Pemerintah Kalurahan Banguntapan.

"Pada prinsipnya mereka mendukung karena memang kita kan butuh [TPST]. Nah, sampah-sampah di depo sampah dan lain-lain nanti masuk ke situ [TPST]. Tetapi tidak seluruh Bantul, soalnya juga tidak cukup. TPST tersebut hanya dapat menampung kurang lebih 40 ton sampah per hari," katanya. Pembangunan TPST menyedot anggaran APBD hingga Rp5 miliar. Sementara ini, DLH Bantul sedang melengkapi syarat-syarat agar bisa mendapat pendanaan dari Pemerintah Pusat. Ari menjelaskan TPST tersebut nantinya mirip

seperti yang ada di Kalurahan Panggungharjo. Sampah residu akan dihancurkan sementara sampah anorganik akan dijual.

Gerobak Sampah

Kota Jogja mulai 1 Januari 2023 kemarin telah menerapkan larangan pembuangan sampah anorganik ke TPST Piyungan. Untuk melancarkan kebijakan itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jogja mempersiapkan 30 gerobak sampah bagi masyarakat, khususnya pengelola bank sampah. Penyediaan 30 gerobak sampah tersebut juga dilakukan agar pemilahan sampah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sejak lingkungan rumah tangga. Bank sampah yang membutuhkan gerobak sampah tersebut dapat mendapatkannya dengan mengajukan permohonan terlebih dulu.

Kepala DLH, Sugeng Darmanto, menjelaskan pembagian gerobak untuk memfasilitasi bank sampah agar mampu mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik. "Ini bentuk dukungan kami untuk bank sampah agar makin baik manajemennya, agar prasarana mereka juga ikut meningkat," katanya, Senin.

Fasilitas lainnya, jelas Sugeng, untuk memaksimalkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan ditingkatkan lagi pada 2023. "Ke depan akan kami tambah lagi fasilitas yang dapat digunakan masyarakat untuk pengelolaan sampah ini," ujarnya.

Anggota DPRD Jogja Antonius Fokki Ardiyanto mengapresiasi langkah fasilitasi DLH tersebut. "Kemarin saya ikut bantu bank

sampah untuk bikin permohonan gerobak tersebut dan dikabulkan total ada tiga gerobak," katanya.

Fokki menyebut tiga gerobak tersebut untuk Kelurahan Surokarsan RW 4, Brontokusuman RW 5, dan Keparakan RW 7. "Lewat gerobak ini, saya berharap pemilahan sampah lebih dimaksimalkan karena ada gerobak baru yang bisa menambah armada angkutan sampah jadi tidak disatukan antara sampah organik dan anorganik," jelasnya.

Penggerobak atau petugas yang mengambil sampah dari permukiman penduduk di Kota Jogja mengeluhkan masih banyak warga belum memilah sampah sesuai ketentuan yang berlaku mulai awal Januari yaitu gerakan nol sampah anorganik. "Sejak pagi sampai siang ini, saya masih harus memilah sampah yang dibuang warga agar bisa dibuang ke depo sampah karena kalau tidak dipilah tidak boleh dibuang," kata salah satu penarik gerobak sampah dari Kelurahan Warungboto Ngatiman.

Menurut dia, masyarakat sudah mengetahui aturan yang berlaku. Per 1 Januari 2023 tidak lagi diperbolehkan membuang sampah anorganik. "Namun, pada kenyataannya masih banyak sampah yang dicampur dan mau tidak mau harus saya pilah. Bagi saya, ini membuat sakit hati karena masih banyak warga melanggar aturan," katanya.

Oleh karena itu, Ngatiman berharap masyarakat memiliki kesadaran memilah sampah sejak dari rumah tangga agar sampah bisa dibuang lebih cepat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005